

MANAJEMEN PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK MENAIKKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI DI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA KOTA LANGSA)

Ahmad Syahbuddin

Kepala Sekolah SD Negeri Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat,
Kota Langsa, Aceh, Indonesia
Email: ahmadsyahbuddin2@gmail.com

Abstrak

Pendanaan pendidikan yang terkenal dengan program dana BOS, menuntut sekolah agar dapat membuat rencana, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pengendalian anggaran pendidikan secara jelas kepada pemerintah dan masyarakat. Sekolah harus membuat prioritas skala keperluan sekolah yang terpenting dan berdampak langsung kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan pemerintah. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab pemanfaatan dana BOS di sekolah mempunyai tugas yang besar untuk mengelola distribusi pendanaan untuk operasional sekolah. Keberadaan dana BOS, diharapkan layanan pendidikan dasar memberi kenaikan kriteria penilaian supaya mendorong daya saing sampai tuntas Wajib Belajar 9 tahun.

Dengan adanya dana BOS diharapkan dapat mengurangi beban pendidikan yang ditanggung oleh orang tua siswa, dan bahkan jika dimungkinkan mendapatkan pendidikan secara gratis bagi siswa miskin atau setidaknya dapat bersekolah dan menuntaskan pendidikan dasar. Jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Prosedur yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa Manajemen pemanfaatan dana bantuan operasional di SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa dan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa, telah sesuai dengan petunjuk yang diberikan, dimulai dari perencanaan anggaran, pengorganisasian, pelaksanaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran, hal ini dibuktikan dengan adanya RKAS meskipun masih ada yang perlu direvisi, SK tim manajemen BOS sekolah, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS.

Kata kunci: Manajemen, Manajemen Pengendalian Bantuan Operasional Sekolah, Mutu Pendidikan

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha menjadikan kondisi proses belajar mengajar supaya siswa dapat belajar aktif demi mengembangkan potensi dirinya secara sadar dan terencana; siswa diharapkan memiliki pengendalian diri, akhlak mulia, keterampilan, kekuatan spiritual, keagamaan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, negara yang menjamin kehidupan masyarakat mempunyai keharusan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan kenaikan taraf hidup masyarakat. Layanan pendidikan dasar yang belum terjangkau oleh kelompok masyarakat yang belum melewati program wajib belajar 9 tahun lebih agar mudah menerima informasi, ini menjadi sasaran utama garis haluan pembangunan pendidikan

Salah satu bentuk janji pemerintah itu tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dan menjalankan seluruh proses pendidikan dengan transparan dan akuntabel yang mesti dikelola dengan baik dan bertanggungjawab guna menjaga kepercayaan publik. Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional membeikan amanah kepada pemerintah bahwa setiap warga negara dengan rentang usia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (bunyi pasal 34 ayat 2), sementara pada ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyikapi undang-undang ini secara serius dengan memberi wahana pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lainnya sesuai amanat UU ini.

Pendidikan yang bermutu dapat dinilai dari 2 hal, yaitu prosesnya dan hasilnya. Yang disebut sebagai proses pendidikan adalah berbagai *input*, seperti sarana dan prasarana serta bahan ajar, lengkapnya administrasi serta usaha menciptakan suasana yang nyaman. Yang disebut sebagai hasil pendidikan memberikan sudut pandang pada prestasi sekolah dalam kurun waktu yang ditentukan. Jika proses dilaksanakan dengan didukung oleh kualitas guru serta sarana dan prasarana yang baik, akan mempunyai peluang besar pada kenaikan mutu pendidikan. Dalam usaha mengangkat mutu pendidikan (menyangkut prosesnya dan hasilnya) tidak dapat terpisah dari anggaran pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebijakan anggaran dari pemerintah untuk membantu biaya penyebaran informasi pendidikan serta peningkatan mutu. Pemanfaatan dana BOS bagi sekolah tingkat dasar di Indonesia dimaksudkan untuk

memberi dana agar tercapai program Wajib Belajar 9 tahun mencapai hasil tuntas dan bermutu.

Juknis pemanfaatan dana BOS sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala sekolah memegang tanggung jawab atas pengaturan alokasi pendanaan operasional ini.

Kebijakan pemerintah melalui penyaluran dana BOS belum dapat menghentikan masalah pendidikan, akan tetapi penyelewengan dan tidak efektifnya pengalokasian dana BOS menjadi masalah baru. Penelitian Fitri (2014) memberi gambaran tentang sekolah yang tidak transparan serta komite sekolah tidak diikutsertakan pada pembuatan perencanaan alokasi dana BOS dan mengalokasikan dana BOS tidak sesuai juknis. Hasil audit Bawasda memberi gambaran tentang pengalokasian dana BOS tidak sesuai juknis sehingga laporan pertanggung jawaban dikembalikan (ditolak).

Untuk menghindari ketidakefektifan penggunaan dana BOS, maka diperlukan adanya kemampuan dari kepala sekolah sebagai manajer dalam proses membuat rencana, menyusun organisasi, menentukan arah, mengadakan pengawasan dan memberikan informasi bidang keuangan berupa laporan. Dengan adanya dana BOS ini, kemampuan manajemen keuangan menjadi sangat penting. Fokus penerapannya pada prinsip efektifitas, transparansi, akuntabilitas publik dan keadilan.

Manajemen dana BOS meliputi pembuatan rencana, hal ini tertulis sebagai Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) supaya dijadikan pedoman pada saat pelaksanaan hingga evaluasi. Pemanfaatan dana ini harus menyesuaikan dengan keadaan nyata sekolah dan juga sesuai petunjuk teknis yang sudah ditentukan. Pembuatan laporan keuangan secara administratif diperlukan untuk pedoman supaya tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan dana BOS. Oleh karena itu manajemen dana BOS sangat penting perannya untuk mengelola dana BOS agar memenuhi kriteria efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Langsa tidak semua dijadikan sebagai subyek penelitian. Dalam penelitian ini hanya diambil dua Sekolah Dasar yaitu SD Negeri Paya Bujok Teungoh dan SD Swasta Al Kautsar. Dasar pemilihan lokasi penelitian ini karena kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, hasil observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal 12 November 2018, menunjukkan bahwa kedua sekolah dasar tersebut belum pernah menarik sumbangan berupa iuran peserta didik dalam usahanya membiayai pendidikan. Dana BOS dijadikan sebagai sumber keuangan tunggal dalam kegiatan sekolah. Prioritas yang dilakukan atas alokasi dana BOS yaitu :

- 1) pengembangan perpustakaan melalui pembelian buku teks utama dan buku teks pendamping yang telah ditentukan oleh pemerintah serta buku non teks sebagai sarana belajar,
- 2) proses penerimaan siswa baru.

- 3) pengadaan dana untuk proses belajar mengajar dan berbagai kegiatan penilaian, seperti : dana ulangan harian, dana UTS, dana ulangan semester, dana ujian sekolah, dana analisis, dana remedial dan dana program pengayaan, dan dana pembuatan rapor siswa.
- 4) distribusi dana pada bidang kesiswaan yaitu ekstrakurikuler (berupa program olah raga, program UKS, program paskibra, program kesenian, program keagamaan, program pramuka, kegiatan palang merah remaja).

Sesuai dengan pedoman standar pemanfaatan program dana BOS tersebut, proses belajar dan mengajar di kedua Sekolah Dasar tersebut dapat dijalankan sesuai harapan.

Kajian Teoritik

1. Definisi Manajemen

Menurut Sugitno (2013:1), Manajemen artinya upaya berfikir dan meraih hasil berdasarkan usaha tim untuk memberdayakan bakat manusia dan sumber daya usaha. Manajemen juga berarti tindakan membuat rencana dan melaksanakan hal yang dianggap penting guna pemuasan kebutuhan ekonomi dan sosial.

Menurut Shulhan dan Soim (2013: 7), manajemen mempunyai 2 arti, yaitu sebagai metode dan sebagai ilmu dan seni. Sebagai metode artinya berfokus pada penggunaan SDM. Sebagai ilmu dan seni artinya berfokus pada cara agar lebih produktif, efektif dan efisien sesuai perencanaan.

Menurut Saefullah (2012: 49), manajemen artinya perbuatan pimpinan melaksanakan amanah sesuai nilai keadilan dengan tidak menzalimi bawahan.

Menurut Fattah (2013:1), manajemen artinya proses membuat rencana, mengorganisasi, memimpin dan proses mengendalikan kekuatan organisasi demi tercapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

Fungsi *perencanaan* artinya proses diambilnya keputusan secara ilmiah dengan cara meninjau kelebihan dan kekurangan, menetapkan kesempatan maupun ancaman, merumuskan rencana, merumuskan kebijakan dan merumuskan program suatu organisasi.

Fungsi *pengorganisasian* artinya membuat kombinasi yang pas pada pelaksanaan program dengan cara menentukan manfaat, menentukan hubungan (tanggung jawab dan wewenang), dan menentukan struktur (vertikal dan horisontal) agar alokasi sumber daya berjalan tepat guna.

Fungsi *pemimpin* adalah sebagai manajer yang membuat pengaruh dan memberi arah sumber daya manusia dibawahnya.

Fungsi *pengawasan* artinya memberikan ukuran, standarisasi dan supervisi agar organisasi mencapai tujuannya. Manajemen bisa diukur dengan pengawasan yang efektif.

Suatu perbuatan untuk mencapai hasil manajemen berdasarkan nilai keadilan membutuhkan pelaksanaan fungsi perencanaan, pelaksanaan fungsi pengorganisasian, pelaksanaan fungsi kepemimpinan dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Islam memberikan arahan bahwa segala urusan harus dilakukan secara tertib, rapi, sah dan teratur dari tingkat biasa sampai tingkat kompleks. Hal ini dibutuhkan manajemen supaya lebih efektif dan efisien sesuai tujuan yang hendak diraih dapat tercapai.

2. Manajemen Pendanaan Pendidikan

PP No. 48 Tahun 2003 perihal pemanfaatan dana pendidikan, pemanfaatan dana pendidikan berdasarkan pada azas keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Menurut Soeryani, dalam buku Sulistyorini (2009: 130), manajemen keuangan dalam arti luas adalah bentuk pertanggungjawaban pada pemanfaatan keuangan baik pemerintahan pusat maupun daerah, sedangkan dalam arti minim adalah aturan pembukuan.

Menurut (Mulyono, 2012: 87), manajemen keuangan adalah cara mencari sumber dana dan cara menggunakan dana sesuai standar, memperbesar modal pada waktu yang akan datang. Menurut Matin (2014: 4), pendanaan pendidikan adalah teknik membuat tepat guna sumber pendanaan saat kegiatan atau saat melaksanakan operasional pendidikan atau dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Pendanaan yang dimaksud adalah biaya perencanaan pendidikan, biaya proses pendidikan, biaya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, serta biaya pengawasan pendidikan.

Menurut Fattah (2012: 6), pendanaan pendidikan adalah cara merumuskan dan mengoperasionalkan sumber daya dan pendapatan sekolah sesuai letak geografis dan tingkat pendidikan. Menurut Supriadi (2010: 4), pendanaan pendidikan terdiri atas 2 macam, yaitu *private cost* (biaya individu) dan *social cost* (biaya sosial). Biaya individu disebut juga pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk keperluan pendidikan. Biaya Dana sosial adalah dana yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, disalurkan melalui sekolah/madrasah, atau disalurkan melalui pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk pendidikan. Menurut Mulyono (2010: 72), pendanaan pendidikan adalah analisa sumber pendapatan dan penggunaan biaya untuk melaksanakan proses pendidikan agar efektif dan efisien.

Kesimpulannya, manajemen pendanaan pendidikan adalah kerjasama antar pribadi dan antar kelompok dibidang pendidikan agar berjalan efektif dan efisien mencapai tujuan.

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Permendiknas No. 63 tahun 2009 bahwa pengertian mutu pendidikan adalah tahap kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sisdiknas. Menurut Surya (dalam Sunu, 2014: 142), mutu pendidikan adalah kadar dan keluaran pendidikan menyeluruh sesuai kriteria.

Masalah nasional sekarang adalah mutu pendidikan dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pengertian mutu pendidikan yang maksud mengacu

kepada *input*, proses dan *output* pendidikan. *Input* adalah hal yang harus ada agar proses dapat berlangsung. *Input* terdiri atas empat jenis, yaitu:

- a. *Input* sumber daya manusia (SDM) terdiri dari kepala sekolah, guru, pengawas, staf TU dan siswa;
- b. *Input* sumber daya peralatan, perlengkapan, uang, dan bahan;
- c. *Input* Perangkat (manajemen) terdiri dari struktur organisasi peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, kurikulum, rencana dan program;
- d. *Input* Harapan terdiri dari visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran sekolah.

Proses pendidikan mengantarkan perbuahan input menjadi output. Sekolah yang efektif ditandai dari tingginya efektifitas kegiatan belajar mengajar, dan pengendalian tenaga pendidik dan kependidikan secara efektif. Kualitas proses diukur dari terpondunya input yang selaras sehingga tercapai situasi *enjoyable learning* (pembelajaran menyenangkan), menaikkan semangat dan minat belajar dan mendorong ide kreatifitas yang baru dari siswa. Siswa dapat menyerap pengetahuan sampai menjadi muatan batin sehingga dapat dihayati dan dijamin dalam kehidupannya serta secara terus menerus mengembangkan diri.

Output pendidikan adalah performa (kinerja) sekolah sebagai buah pendidikan. Output pendidikan dinyatakan tinggi jika performa sekolah bernilai tinggi baik akademik, nonakademik dan prestasi lainnya terus meningkat. Hal yang berhubungan dengan output ada lima aspek, yaitu :

- a. *Reability* (keandalan), yaitu kecakapan pelayanan secara sempurna, tepat waktu dan memuaskan.
- b. *Responsiveness* (daya tangkap), yaitu kecakapan guru membantu siswa dengan pelayanan yang responsif. Pelayanan responsif mendorong siswa mengembangkan kreatifitas dan kemampuannya.
- c. Tenaga kependidikan (tendik) harus ahli dibidangnya, menjaga mutu pendidikan yang positif kepada masyarakat. Seluruh tendik bersikap dan berperilaku sopan dan profesional.
- d. Tenggang rasa, mudahnya hubungan komunikasi antara guru dan siswa.
- e. Bukti langsung (*tangible*), terdiri dari fasilitas, perlengkapan, tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana komunikasi (Mulyasa, 2013: 227-228).

Kesimpulannya, mutu pendidikan dilihat dari hasil pendidikan berupa prestasi sekolah setiap periode waktu tertentu (triwulan, caturwulan, semester, setahun, 5 tahun dan seterusnya). Prestasi ini dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya, ulangan umum, UN, dan lain-lain), dapat pula prestasi dibidang non akademik misalnya dalam cabang olahraga atau seni. Prestasi sekolah juga dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang diantaranya suasana saling menghormati, disiplin, dan suasana keakraban.

2. METODE PENELITIAN

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini di Sekolah Dasar Negeri Paya Bujok Teungoh dan Sekolah Dasar Swasta Al

Kautsar Kota Langsa. Adapun waktu penelitian yang berlangsung di SD Negeri Paya Bujok Teungoh dan SD Swasta Al Kautsar Langsa adalah Oktober sampai dengan Juli 2019.

b. Latar Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Langsa. Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Langsa yang dijadikan subyek penelitian 2 (dua) Sekolah Dasar yaitu SD Negeri Paya Bujok Teungoh dan SD Swasta Al Kautsar. Pemilihan lokasi penelitian ini karena kedua sekolah tersebut merupakan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Tahun Anggaran 2018. Selain itu, kedua sekolah dasar tersebut belum pernah menarik sumbangan maupun iuran dari siswa untuk menunjang pendanaan sekolah. Sumber keuangan yang digunakan dalam kegiatan sekolah satu-satunya adalah dana BOS. Berdasarkan kebijakan alokasi rencana dana BOS tersebut, KBM di kedua Sekolah Dasar tersebut dapat berjalan dengan baik.

c. Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan tipe penelitian lapangan serta menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena penelitian ini menerapkan tanda-tanda pada dasarnya terletak pada pengamatan manusia dan lingkungannya, bagaimana cara berhubungan dengan manusia tersebut dalam bahasanya dan peristiliahannya (Kirik dan Miller dalam Moleong, 2002: 114-115).

Data diambil dan diprioritaskan sangkutkan dengan lingkungan yang dialami (*Natural Setting*) sebagai sumber data langsung. Penelitian ini diharapkan bisa memberi temuan dan gambaran data lengkap menyeluruh. Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode kualitatif, alasannya : *Pertama*, berupaya memberikan penyajian langsung landasan hubungan antara peneliti dengan responden agar menjadi peka terhadap model-model nilai yang dihadapi ketika di lapangan. *Kedua*, perolehan data dilakukan melalui wawancara detail dan observasi berupa analisis dokumen. Data yang ada dihimpun secara lengkap, lalu dibuat kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif, dimana datanya berupa kata ungkapan dan tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya mendiskripsikan keadaan yang diteliti sesuai kenyataan serta memberi arah guna memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara akurat dan teratur (Mulyana, 2001: 155).

Penelitian ini mempunyai tujuan mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan sebenarnya terjadi saat penelitian diselenggarakan berfokus pada gejalanya. Jadi, pada penelitian ini peneliti berusaha memberi paparan tentang manajemen penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menaikkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Langsa.

d. Data dan Sumber Data

Menggali data deskriptif selengkap mungkin menjadi prioritas peneliti agar memberi hasil maksimal berupa hasil wawancara atau dari data-data tertulis lainnya untuk mendukung terhadap kepentingan peneliti. Pendekatan kualitatif dipakai untuk mengungkapkan data-data secara deskriptif mengenai apa yang dilakukan, dialami dan dirasakan. Dalam penelitian ini datanya berupa:

1. Data Pokok, yaitu perolehan data dari langsung dari wawancara. Yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini meliputi;
 - a. Manajemen keuangan sekolah dalam hal ini yang menjadi koresponden adalah : kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara.
 - b. Pendidik dan peserta didik, pengambilan datanya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2015: 300),
 - c. cara mengambil data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap tahu tentang apa yang peneliti harapkan, merupakan arti dari *Purposive Sampling*.
2. Data Pelengkap, yaitu data yang diambil dari data yang sudah ada, kemudian mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan oleh data pokok, antara lain berupa dokumen-dokumen, staf TU dan komite sekolah.

e. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Tahapan berikutnya yang sangat penting adalah bagaimana cara mengumpulkan data. Peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi.

f. Prosedur Analisis Data

Metode analisis data kualitatif menjadi pilihan untuk menganalisa data. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:337), analisis data kualitatif terdiri dari tiga proses kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Kegiatan membuat rangkuman atas catatan di lapangan mengenai hal yang penting yang berhubungan dengan masalah yang disajikan pada penelitian. Rangkuman ini harus menggambarkan pokok masalah sehingga jika terjadi proses pencarian kembali dapat ditemukan dengan mudah.

Jadi, reduksi data yaitu data yang telah disusun dalam laporan lapangan dilakukan pemilihan selanjutnya disusun kembali dalam bentuk uraian dan laporan secara terperinci. Kemudian laporan yang telah direduksi dipilih dan dirangkum berdasarkan hal-hal pokok dan sesuai dengan pusat penelitian, hal ini diharapkan memperoleh lukisan yang relatif sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penataan data yang telah diseleksi dan diklasifikasikan agar lebih mudah dianalisis.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil dan diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Kesimpulan ini menjadi tahap akhir penelitian.

3. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

a. Perencanaan Anggaran BOS

Perencanaan keuangan SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa dan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa dengan cara dilakukan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Penyusunan RKAS sekolah dimulai dengan mengenalkan dan mempelajari tujuan setelah mengkaji visi, misi sekolah dan melakukan evaluasi diri sekolah (EDS). Mengawali tahun pelajaran, para guru diminta untuk memberikan program kerja yang disertai anggaran kegiatannya kepada pihak sekolah. Hal ini berarti adanya penyaluran yang baik antara pengelola keuangan dana BOS dan guru dalam program KBM.

Selanjutnya dari pihak SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa dalam pembuatan RKAS tidak ada pendistribusian berdasar skala prioritas anggaran. Titik utamanya adalah terlaksananya proses utama yaitu pembelajaran terhitung dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, remedial dan pengayaan. Kemudian untuk penguatan pendidikan karakter dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Pembagian dana BOS juga berdasarkan bagian yang telah ditetapkan pemerintah sesuai petunjuk teknis seperti 20% untuk pembelian buku dan 15% untuk gaji atau honor guru dan karyawan sekolah. Lain halnya dengan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa, ada skala prioritas untuk memenuhi standar nasional pendidikan dan berorientasi pada visi misi dan tujuan sekolah yaitu untuk biaya tenaga honorer yaitu sebesar 50%.

Pengurus dana BOS mengerjakan pembuatan rencana anggaran yang mengekspresikan tujuan yang berbentuk operasional. Bentuk operasional yang terukur. Maksudnya adalah RKAS, di dalam RKAS itu memuat berbagai bentuk program yang akan dilakukan. Sifat pelaksanaan program dilakukan mulai dari yang harian, bulanan ataupun kurun waktu kedepan yang lebih panjang.

Walaupun demikian pengelola dana BOS di SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa dalam membuat rencana penggunaan anggaran dana BOS tidak terlepas dari kendala yang dijumpai, yaitu sulit untuk mengumpulkan tim manajemen BOS sekolah dikarenakan kesibukan masing-masing, program aplikasi yang ditentukan oleh pihak tim manajemen BOS kabupaten/kota yang selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan administrasi yang diminta. Sedangkan kendala dalam membuat rencana penggunaan anggaran dana BOS di SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa yaitu sulitnya mengundang

pengawas untuk datang ke sekolah. Selain itu, dana BOS wajib dipajangkan di dinding sekolah agar yang berkepentingan tahu penggunaan dana BOS, resiko besarnya anggaran di pertanggung jawabkan oleh kepala sekolah karena pihak lain yang tidak berkepentingan selalu mengintai kepala sekolah. Hal seperti ini yang harus cepat dicari penyelesaian yang terbaik demi kelancaran rencana sekolah yang akuntabel.

Anggaran pendanaan pendidikan yang sangat terkenal di masyarakat adalah program dana BOS, merakyat serta mempunyai pengaruh yang bermanfaat secara langsung dalam upaya menuntaskan Wajib Belajar (wajib) 9 tahun, kesetaraan dan keseimbangan bidang pendidikan serta usaha menaikkan mutu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Departemen Pendidikan Nasional sebagai komandan program ini. Pengedaran, pemanfaatan dan laporan pertanggungjawabannya dijalankan secara harmonis oleh pihak yang terpaut dari menteri hingga kepada kepala sekolah sebagai pengelola. Keberadaan adanya dana BOS, diharapkan layanan dikdas memberi kenaikan kriteria supaya mendorong daya saing sampai tuntas Wajib Belajar 9 tahun.

Namun, saat cairnya dana BOS pada pelaksanaannya, belum mampu secara optimal membantu menaikkan mutu pendidikan. Adanya program dana BOS tidak dapat diartikan bahwa masalah pendidikan selesai, terkait dengan tidak tepat guna pada pendistribusian dana BOS merupakan masalah baru muncul, dan pemanfaatan dana BOS yang tidak efektif.

Dana APBN di tahun 2018 mengalami peningkatan sekitar 20% untuk dana BOS bagi siswa,. Permasalahan pemanfaatan dana ini hanya sebagian kecil dari permasalahan yang sudah nampak. Berdasarkan fakta, ditemukan penerapan dana BOS tidak sesuai sasaran, dana BOS berpeluang besar untuk diselewengkan, pendistribusian dana BOS pada sekolah swasta dan negeri dibuat sama persis pada semua sekolah. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa setiap sekolah memiliki kebutuhan dan permasalahan yang berbeda. Hambatan selanjutnya adalah terjadi keterlambatan pencairan dana BOS. Fokus masalahnya pemenuhan kriteria kenaikan mutu proses pembelajaran.

Ujian nasional yang sama setiap daerah yang dibuat sama menunjukkan poin ketidakadilan, ini disebabkan oleh perbedaan kelengkapan sarana prasarana, perbedaan kemampuan guru. Saat ujian harus melewati batas ukuran berupa ujian nasional (UN). Kalau ukuran ini ditiadakan maka kesulitan mengontrol kualitas pembelajaran sulit dilakukan. Masalah lainnya yaitu perbedaan pemahaman pada istilah otonomi sekolah.

Pemerintah telah menerapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang harus dipenuhi pada satuan Pendidikan sehingga sekolah dikatakan bermutu. Kalau pendistribusian dana BOS tidak sesuai petunjuk teknisnya akan mengakibatkan sekolah akan sulit mencapai delapan standar yang telah ditetapkan dalam

SNP. Hal penggunaan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis ini menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional dan mempengaruhi jaminan mutu SDM.

b. Pengorganisasian Anggaran BOS

Proses pengorganisasian anggaran BOS di SD Negeri Paya Bujok Teungoh dan SD Swasta Al Kautsar Langsa dilakukan dengan aturan: proses pemerincian pekerjaan, pembagian kerja, pekerjaan para tim, koordinasi pekerjaan dan monitoring.

Tahap pertama yang dilakukan adalah merinci pekerjaan, yang terdiri dari 8 SNP yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), standar sarana dan prasarana (sarpras), standar pengelolaan, standar pendanaan dan standar penilaian, dengan menentukan tugas-tugas apa yang dilakukan Tim penyusun RAPBS untuk merincikan 8 standar nasional pendidikan tersebut.

Tahap kedua pembagian kerja yang ditentukan oleh kepala sekolah dengan cara mengklasifikasi 8 standar itu kepada tim serta memberikan jabaran 8 komponen SNP, kemudian mengelompokkan seluruh beban kerja menjadi program kegiatan yang bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok penyusun.

Tahap ketiga yaitu menyusun program kegiatan yang efektif dan efisien dengan menggabungkan berbagai tim. Tujuan penggabungan ini adalah untuk mempermudah pendistribusian dana.

Tahap keempat, membuat koordinasi pekerjaan yang mempunyai mekanisme kerja sebagai kesatuan yang harmonis dengan cara rapat bersama, sehingga ada kemudahan setiap tim memapakan kebutuhan sekolah dengan dana yang ada, selanjutnya selanjutnya diplenokan dan disepakati bersama oleh tim, akan disusun menjadi dokumen APBS.

Kelima, melakukan monitoring dengan menilai draf yang akan ditetapkan dan mengambil tindakan penyesuaian buat mempertahankan serta meningkatkan efektifitas, lalu perbaikan atas kegiatan yang perlu disqualifikasi atau pengukuhan.

Mekanisme pengaturan pos pendanaan pendidikan di SD Negeri Paya Bujok Teungoh dan SD Swasta Al Kautsar Langsa diawali rapat penyesuaian dengan kepala sekolah, guru dan komite sekolah serta seluruh stakeholder sekolah. Pembentukan desain kewenangan dan proses koordinasi pendanaan pendidikan yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Langkah awal yang dilakukan sekolah yaitu memprioritaskan skala keperluan sekolah yang terpenting dan berdampak langsung kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar, contohnya : alat KBM, lomba siswa, honor guru dan karyawan non PNS dan tahap evaluasi. Delapan SNP menjadi perhatian untuk pemenuhan kebutuhan sekolah, yang merupakan pedoman untuk melaksanakan pendanaan pendidikan.

Filosofi yang sesuai di kemukakan dengan Terry (dalam Mufron, 2013: 159) yaitu pengorganisasian dilaksanakan untuk mengumpulkan dan menata semua sumber yang disyaratkan pada rencana, terutama SDM,

sehingga tindakan perolehan tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Proses penghimpunan dan penyusunan sumber daya merupakan pendapat konsep ini, agar tidak terjadi hambatan serius, dan dapat dengan mudah dilaksanakan oleh pelaksana program, pendistribusian anggaran dana BOS harus meninjau sumber daya yang telah tersedia dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah ada sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini adalah stakeholder sekolah dalam penyusunan program.

Selanjutnya, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian anggaran sekolah dibuat berdasarkan program kerja sekolah, kemudian dikelompokkan dengan melihat ukuran prioritas kebutuhan program yang di usulkan guru-guru, penanggungjawab kegiatan menyusun dalam susunan RKAS, dengan memilih kebutuhan yang menjadi prioritas. Kemudian diadakan rapat untuk dijadikan draf RAPBS. Menurut Mufron (2013:159) yang mengatakan bahwa tindakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien dapat dilakukan pengorganisasian untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang diisyaratkan dalam program, terutama sumber daya manusia.

Proses pengorganisasian artinya hampir sama dengan perencanaan, perbedaannya dalam hal pembagian pekerjaan dan pengkoordinasian program, memprioritaskan kepentingan program merupakan perumusan dari pengkoordinasian dan perencanaan. Ada tiga unsur dari hasil pengorganisasian pendanaan yaitu, kerjasama, pengutamakan kebutuhan, dan maksud yang hendak dicapai.

c. Pelaksanaan Anggaran BOS

Pelaksanaan aktifitas pembelanjaan anggaran keuangan di SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa, berdasarkan temuan di lapangan mengacu pada Juknis BOS yaitu dalam melaksanakan anggaran dan membelanjakan keuangan pengelola dana BOS, menulis berbagai sumber keuangan yang masuk beserta jumlahnya dan merincikan pendistribusian dana pada pembukuan serta menyetorkan pajak. Penerimaan dan pengeluaran dana BOS dicatat pada beberapa buku, yaitu: 1. Buku Kas Umum (BKU) berguna mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang 2. Buku Kas Pembantu (BKP) untuk mencatat setiap transaksi kontan 3. Buku Pembantu Bank (BPB) untuk mencatat tiap transaksi melalui bank 4. Buku Pembantu Pajak (BPP) untuk mencatat semua transaksi yang wajib dipungut pajak.

Demikian juga dengan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa, berdasarkan temuan di lapangan sekolah ini mengacu pada juknis BOS dalam melaksanakan anggaran dan membelanjakan keuangan pengelola dana BOS, menulis berbagai sumber keuangan yang masuk beserta jumlahnya dan merincikan pendistribusian dana pada pembukuan serta menyetorkan pajak. Pembukuan

yang digunakan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana BOS adalah Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu pada SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa sudah tersedia dan selalu aktif digunakan oleh bendahara. Buku pembantu kas memuat seluruh transaksi pengeluaran keuangan sekolah secara rinci. Antara BKU dan BPK ada sedikit perbedaan yaitu jika BKU untuk penanggalan pengeluaran keuangan ditulis ketika lunas dibayar, sedang BPK setiap terjadi transaksi akan ditulis sesuai tanggal terjadinya transaksi tersebut.

Selain dilakukan pembukuan diatas, kepala SD Negeri Paya Bujok Teungoh dan kepala SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa melaksanakan opname kas dan membuat Berita acara pemeriksaan kas yang dilakukan dengan menutup BKU setiap akhir bulan oleh kepala sekolah dan bendahara ditandatangani BKU yang bersangkutan. Jika dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah, bendahara dan kepala sekolah menarik dana tersebut dan kemudian mencatat di dalam buku kas umum dan buku kas pembantu BOS. Kemudian bendahara dapat membelanjakannya untuk kepentingan kegiatan dan program sekolah yang telah disusun dalam RAKS. Bendahara mencatat segala pengeluaran di dalam buku kas pembantu secara terperinci.

Semua hal yang berurusan dengan pengeluaran dan pendistribusian dana BOS dilaporkan oleh baik bendahara SD Negeri Paya Bujok Teungoh maupun bendahara SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa kepada kepala sekolah masing-masing setiap transaksi di akhir bulan, hal ini dilakukan sebagai bahan untuk membikin laporan per triwulan yang akan di kirim ke Disdikbud Kota Langsa dengan bukti-bukti pengeluaran keuangan dan bukti setor pajak. Laporan dana BOS dilakukan setahun empat kali sesuai juknis pelaporan dana BOS, yaitu : triwulan pertama pada bulan Maret, triwulan kedua pada bulan Juni, triwulan ketiga pada bulan September dan triwulan keempat bulan Desember, dan juga laporan via online.

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas pelaksanaan pendistribusian dana penerimaan dan pengeluaran, semuanya dicatat dan dilaporkan sesuai juknis penguasaan dana BOS. SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa dan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa selalu mengikuti aturan yang ada di dalam juknis BOS sebagaimana yang sudah direncanakan pendistribusiannya pada RKAS. Ini berarti pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan dan juga program sekolah harus mengikuti dari 11 (sebelas) item/komponen pendanaan dalam juknis BOS. Dengan demikian pengendalian pelaksanaan dana BOS di SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa dan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa sudah sesuai kebijakan yang berlaku.

d. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BOS

Berdasarkan temuan dilapangan evaluasi pelaksanaan anggaran BOS pada SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa dan SD Swasta Al

Kautsar Kota Langsa, dijalankan dengan baik oleh pengelola atau manajemen BOS sekolah, tim manajemen BOS kabupaten dan inspektorat/BKPD. Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terus menerus sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran dana BOS, baik evaluasi yang dilakukan dari dalam sekolah oleh pihak pengelola dana BOS (kepala sekolah dan bendahara BOS) pada akhir tahun yang diketahui oleh komite sekolah, juga dilakukan pemeriksaan dari luar sekolah oleh instansi vertikal di atasnya dalam hal ini tim manajemen dana BOS Kabupaten, provinsi dan inspektorat setiap akhir tiga bulan.

Hasil evaluasi tersebut dijadikan oleh SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsadan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa sebagai ukuran untuk memperbaiki pembuatan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan anggaran BOS selanjutnya.

Namun demikian masih sering menjumpai berbagai persoalan saat melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Kendala yang dialami oleh SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran yaitu 1) waktu yang sangat singkat, 2) keterlambatan dana BOS yang masuk kerekening BOS sekolah, 3) komite sekolah yang terkadang kurang respon, 4) pembinaan oleh pihak terkait yang kurang berperan, 5) wali murid yang kurang kompeten dan 6) sumber daya manusia yang kurang.

e. Perbedaan Manajemen Pemanfaatan dana Bantuan Operasional di SD Negeri Paya Bujok Teungoh dan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa

SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa sepenuhnya menggunakan dana BOS dalam mengelola pendanaan sekolah. Pengendalian BOS di SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa diawali dengan tahap perencanaan yaitu dengan pembentukan Tim BOS sekolah yang di pimpin oleh Kepala Sekolah. Tim BOS sekolah terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara, guru, orangtua murid dan unsur komite. Kemudian manajemen BOS sekolah yang telah dibentuk bertugas menyusun RKAS. RKAS yang telah disusun tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan pengendalian BOS dalam satu tahun didasarkan kepada 8 standar pendidikan. Antara lain standar isi, proses, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pendanaan dan penilaian.

Delapan poin standart tersebut dirinci dengan menyertakan masing-masing kegiatan dan rencana pendanaanya. Tim BOS sebelumnya meminta dewan guru untuk mengusulkan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Pengusulan dapat berupa alat peraga pembelajaran, sarana prasarana, maupun kegiatan ekstrakurikuler/perlombaan yang akan diikuti dalam satu tahun beserta rencana biaya. Didalam rapat RKAS akan diputuskan apakah usulan

dari guru dapat di kabulkan atau tidak. Asas pemanfaatan harus juga digunakan agar dana BOS tepat guna. Setelah dana BOS pada triwulan tersebut cair sekolah melaksanakan kegiatan pendanaan yang ada di RKAS sesuai dengan jadwal yang dibuat.

Pengendalian BOS di sekolah swasta tidak begitu jauh perbedaannya dengan sekolah negeri. Dimulai dengan pembentukan tim BOS yang terdiri dari berbagai elemen sekolah dan masyarakat. Komite sebagai perwakilan dari masyarakat berfungsi sebagai pengawas dalam pengendalian BOS serta memberi masukan kepada sekolah. Perencanaan BOS erat kaitannya dengan perencanaan akademik sekolah. Didalam perencanaan akademik di sekolah terdapat perencanaan keuangan yang akan dilaksanakan sekolah tersebut. Selain itu perencanaan akademik sekolah terdapat pula cara yang akan dilaksanakan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah.

Perbedaan signifikan dalam pengendalian BOS di SD Negeri Paya Bujok Teungoh dan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa terdapat dalam nominal yang digunakan untuk gaji guru dan karyawan non PNS. Di SD Negeri Paya Bujok Teungoh dalam menggaji guru dan karyawan non PNS diambilkan dari dana BOS maksimal hanya 15% dari total uang yang diterima dalam satu tahun sedangkan untuk SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa berdasarkan juknis BOS tahun 2018 diperbolehkan menggaji guru dan karyawan non PNS maksimal 50% dari dana BOS yang di terima dalam satu tahun. Hal ini berakibat sangat besarnya perbedaan antara jumlah gaji yang di terima oleh guru dan karyawan non PNS di SD Negeri Paya Bujok Teungoh dengan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa. Pengendalian BOS di SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa juga di dasarkan kepada juknis BOS yang sebelumnya di buat oleh sekolah. Juknis tersebut sebagai acuan dalam membuat RKAS, pelaksanaan pendanaan serta penyusunan LPJ BOS di setiap triwulan. Dalam penyusunan laporan haruslah sesuai dengan fakta pengeluaran yang ada. Tiap item pengeluaran dana BOS di laporkan dalam LPJ BOS yang nantinya akan dikumpulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Manajemen pemanfaatan dana bantuan operasional di SD Negeri Paya Bujok Teungoh Kota Langsa dan SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa, telah sesuai dengan petunjuk yang diberikan, dimulai dari perencanaan anggaran, pengorganisasian, pelaksanaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran, hal ini dibuktikan dengan adanya RKAS meskipun masih ada yang perlu direvisi, SK tim

manajemen BOS sekolah, serta laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS.

2. Upaya untuk menaikkan mutu pendidikan baik di SD Negeri Paya Bujok Teungoh maupun SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa sudah terlihat pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun untuk memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan dan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
3. Perbedaan manajemen pemanfaatan dana Bantuan Operasional untuk menaikkan mutu pendidikan terletak pada skala prioritas antara kedua sekolah, pada SD Negeri Paya Bujok Teungoh tidak memprioritas dalam membuat rencana anggaran, karena seluruh dana BOS yang dialokasikan harus sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan di SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa ada skala prioritas dalam membuat rencana anggaran, yaitu untuk pembayaran honor guru dapat dibiayai oleh dana BOS mencapai 50%, sehingga pihak sekolah swasta ini bisa membiayai guru honor sesuai dengan kebutuhan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [2] Mufron] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, Ali, 2013, *Ilmu Pendidikan Islam*, Aura Pustaka, Yogyakarta
- [3] Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*, Alfabeta, Bandung.
- [4] Moleong, Lexy J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Reamaja Rosdakarya, Bandung
- [5] Matin, 2014, *Manajemen Pendanaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [6] Seafullah, U, KH, 2012, *Manajemen Pendidikan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- [7] Fatah, Nanang, 2013, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- [8] Mulyana, Dedy ,2001, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- [9] Usman, Husaini, 2013, *Manajemen, Teori, Praktik,, dan Riset Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- [10] Supriadi, Dedi, 2010, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, PT Remaja Rosda-Karya, Bandung.
- [11] Sulistyorini, 2009, *Manajemen Pendidikan Islam*, Sukses Offset, Yogyakarta.
- [12] Shulhan, Muwahid, dan Soim, 2013, *Manajemen Pendidikan Islam*, Teras, Bandung.
- [13] Soegito, HAT, 2013, *Pergeseran Paradigmatik manajemen Pendidikan*, Widya Karya, Semarang.